



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				v																											

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2016

HALAMAN

C1

Penggunaan Dana Hibah Masih Diperiksa BPK

NUNUKAN – Berdalih masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), audit penggunaan dana hibah senilai Rp 12 miliar untuk Pendidikan Diluar Domisili (PDD) Politeknik (Poltek) Nunukan belum tersentuh Inspektorat Nunukan.

Padahal, Surat Pertanggungjawaban (SPj) Poltek Nunukan telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pekab) Nunukan Februari lalu.

Menurut Sekretaris Inspektorat Nunukan, Budi Prasetya, selain itu, tersendatnya proses audit akibat SPj yang diterima belum layak disajikan. Sebab, masih ada laporan keuangan yang belum memiliki bukti pendukung.

"Penggunaan dana harus lengkap bukti kegunaannya, jadi untuk melakukan audit harus dilengkapi dulu semuanya," kata Budi Pra-

sa kepada *Radar Nunukan* (Radar Tarakan Group) saat ditemui, Jumat (4/3).

Dana hibah yang digunakan PDD Poltek Nunukan senilai Rp. 12 miliar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nunukan 2015 senilai Rp. 7 miliar, APBD Anggaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp. 2 miliar dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp. 3 miliar.

Budi, sapaan akrabnya, menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK saat ini adalah penggunaan dana dari APBD sampai APBN yang digunakan Poltek Nunukan selama 2015 lalu. Untuk menentukan apa-

kah bermasalah atau tidak, belum dapat diketahui karena pemeriksaan masih berlangsung.

"Saya kurang tahu kapan selesai (pemeriksaan, Red). Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Pak H Sabaruddin sebagai Pengawas Keuangan Poltek Nunukan," pinta Budi menyarankan.

Terpisah, Drs. H. Sabaruddin membenarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK Kaltara. "Namun, hasilnya belum bisa disampaikan karena masih pemeriksaan," singkat H. Sabaruddin kepada media ini.

Ia menambahkan, penggunaan dana di Poltek Nunukan tidak bisa disampaikan sepenuhnya karena yang berhak menyampaikan adalah ma-

najemen Poltek Nunukan itu sendiri.

"Ada pertanyaan yang disampaikan BPK kepada saya, tapi saya tidak bisa menjawab sepenuhnya, sebab saat ini posisi saya hanya sebagai pengawas keuangan PDD Poltek saja," kata Dosen Administrasi Bisnis Poltek Nunukan ini.

Ia melanjutkan, adanya ditemukan masalah atau tidak penggunaan dana sebanyak Rp. 12 miliar itu, tergantung hasil pemeriksaan nantinya, jika ditemukan masalah akan ditindaklanjuti kedepannya.

"Jika memang bermasalah, tentu ada konsekuensi yang wajib diterima manajemen Poltek itu sendiri," pungkasnya. (*nal/oya)